

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA
KELOMPOK TANI KECAMATAN TINGGIMONCONG
KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diusulkan oleh

AGUSTINI

Nomor Stambuk : 1056 401599 12



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA
KELOMPOK TANI KECAMATAN TINGGIMONCONG
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh:

AGUSTINI

Nomor Stambuk : 10564 01591 12

Kepada



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Peran Dinas Pertanian Dalam
Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani
Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Nama : Agustini

Nomor Stambuk : 105640159112

Jurusan : Ilmu Pemerintahan



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 169/FSP/A.1-VIII/II/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari kamis tanggal 23 bulan Februari tahun 2017.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Agutini

Nomor Stambuk : 105640159112

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa sebar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 september 2016

Yang Menyatakan



Agutini



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat

1. Bapak DR. H. Lukman Hakim, M.Si selaku pembimbing I dan DR.Hj. Fatmawati, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kedua Orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Juga adik adik saya di pondok mazita Suci, Intan, Itha, Ivha yang senantiasa menemani saya dan membantu saya dalam penelitian yang pernah saya lakukan.
6. Seluruh teman-teman sahabat saya di kelas A ilmu pemerintahan 2012 yang tiada hentinya menjadi teman diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan perkuliahan

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 september 2016

Agustini



DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TIJUAN PUSTAKA	
A. Konsep Pemerintah daerah.....	9
B. Konsep Peran	11
C. Konsep Peran Pemerintah Daerah.....	13
D. Konsep Kinerja.....	15
E. Konsep Kinerja Kelompok Tani	23
F. Konsep Kelompok Tani	24
G. Kerangka Pikir	26
H. Fokus Penelitian.....	28
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	30
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Informan.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
G. Keabsahan Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Karakteristik Obyek Penelitian	35
a. Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	35
b. Kondisi Usaha Tani.....	43
c. Kondisi Geografis Kecamatan Tinggimoncong.....	44
d. Jumlah Penduduk Kecamatan Tinggimoncong.....	45

e. Daftar Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong.....	46
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Kelompok Tani.....	48
a. Peran Dinas Pertanian Dalam Memberikan Pelatihan SDM....	49
b. Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani	53
c. Pengadaan Modal Dan Alat Sarana Kelompok Tani	56
C. Kinerja Kelompok Tani	58
a. Produksi Dan Hasil Panen	58
D. Faktor Penghambat Dan Pendukung dalam Peningkatan Kinerja Kelompok Tani	60
a. Faktor Penghambat.....	60
b. Faktor Pendukung	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
Daftar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang artinya sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian menunjukkan demikian besar peranan sektor pertanian dalam menopang perekonomian dan memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi ke depan. Namun, Pembangunan pertanian dinegara kita masih terkendala oleh banyak faktor yang menyebabkan sulitnya bagi para petani untuk berkembang, oleh karena itu dibutuhkan fasilitator yang dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat antara lain sebagai orang yang mampu membantu masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan bertani, orang yang mampu mendengar dan memahami aspirasi masyarakat, mampu memberikan dukungan, mampu memberikan fasilitas kepada masyarakat.

Sudah sejak lama Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat petani yang merupakan porsi terbesar dari struktur masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk program telah diterapkan untuk membantu petani agar mampu memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dalam perekonomian di Indonesia. Berbagai bantuan juga telah dilaksanakan mulai dari subsidi Sarana Produksi, Bantuan Modal Langsung, Kredit Usaha Tani, dan lain sebagainya yang jumlahnya sangat beragam. Namun hasilnya petani

Indonesia masih berpendapatan rendah, masih tergantung terhadap berbagai bantuan, dan masih selalu berfikir belum mampu bergerak sendiri dalam melaksanakan usaha taninya. Begitu pula dengan program-program penyuluhan pertanian yang selama ini sudah berjalan, belum mampu secara optimal membantu petani dalam meningkatkan taraf hidupnya, serta belum mampu mendorong petani untuk menemukan pemecahan masalahnya sendiri dalam melaksanakan usaha taninya (Mushero,2008).

Petani merupakan salah satu pelaku utama pembangunan pertanian dan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, dengan demikian keberhasilan pembangunan pertanian lebih banyak ditentukan oleh peranan petani itu sendiri dalam kenyataannya tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan pemerintah.

Guna menyikapi hal ini, maka dikembangkan Pendekatan Pengembangan kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan dan kebutuhannya. Pengembangan Kelompok merupakan serangkaian proses kegiatan memampukan/memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Proses pengembangan kelompok dimulai dari proses pengenalan akan program, berlanjut pada Kajian Pedesaan Partisipatif dan diperkuat ketika masyarakat merasa mereka perlu berbagi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Peran pihak luar hanyalah sebatas mendampingi kelompok ke arah kemandirian. Sikap pendamping yang mau

belajar dari masyarakat, merasa setara (bukan guru petani), tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, sikap bersahabat akan sangat membantu proses ini (Wawan, 2013).

Melihat dari sisi masyarakat, dengan berkelompok akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, dibandingkan dengan bekerja sendiri. Lagi pula, kelompok merupakan wadah belajar bersama dimana masyarakat bisa saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, kelompok membangun solidaritas sesama warga desa. Dari sisi lembaga, terbatasnya kesanggupan lembaga untuk mendampingi seluruh masyarakat desa, melalui kelompoklah lembaga mencoba melakukan pendekatan pengembangan masyarakat, dengan harapan hasil-hasil yang positif dapat disebarluaskan ke anggota masyarakat lainnya. Kelompok dapat diartikan sebagai suatu wadah masyarakat untuk berkumpul dan bekerjasama dalam mencapai tujuan mereka.

Sedikitnya ada tiga alasan mengapa diperlukan kelompok tani dalam pembangunan pertanian di pedesaan Indonesia. Pertama, rendahnya rasio jumlah PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) dibandingkan dengan jumlah petani sehingga diperlukan wadah yang dapat mempermudah kerja PPL dalam melaksanakan tugas penyuluhan mereka. Kedua, terbatasnya sumberdaya yang dimiliki petani secara individual sehingga dengan bekerjasama dalam kelompok akan mendorong petani untuk menggabung sumberdaya mereka menjadi lebih ekonomis. Ketiga, perilaku berkelompok sudah merupakan budaya Indonesia, terutama di pedesaan (Jamal 2008). Oleh

karena itu kinerja kelompok tani merupakan salah satu aspek penunjang yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan agribisnis, terutama di pedesaan.

Adapun tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pendekatan kelompok, agar lebih berperan dalam pembangunan. Aktifitas usahatani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktifitas usahatani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya. Keberadaan kelompok tani diharapkan dapat memfasilitasi antara petani dengan program penyuluhan pertanian yang mempunyai tujuan selaras yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu pembinaan kelompok tani perlu dilaksanakan secara lebih intensif, terarah dan terencana sehingga mampu meningkatkan peran dan fungsinya.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 7 Tahun 2008 Dinas Pertanian mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Dinas Pertanian sebagai Penyuluh yang bertugas memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi

pertanian yang lebih maju. Dengan demikian seorang penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tiga peranan yaitu berperan sebagai pendidik, memberikan pengetahuan atau cara-cara baru dalam budidaya tanaman agar petani lebih terarah dalam usahatannya, meningkatkan hasil dan mengatasi kegagalan-kegagalan dalam usaha taninya, berperan sebagai pemimpin, yang dapat membimbing dan memotivasi petani agar mau merubah cara berfikir, cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan mau menerima cara-cara bertani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil, sehingga tingkat hidupnya lebih sejahtera, berperan sebagai penasehat, yang dapat melayani, memberikan petunjuk-petunjuk dan membantu para petani baik dalam bentuk peragaan atau contoh-contoh kerja dalam usahatani memecahkan segala masalah yang dihadapi.

Tetapi di lihat di lapangan peran Dinas Pertanian dalam memberikan pengarahan, pembinaan, dan penyuluhan di bidang pertanian masih kurang penyuluh pertanian di lapangan perlu melakukan pendekatan dengan memahami kemampuan kelompok maupun perorangan agar materi yang disampaikan kepada petani dapat dicerna dengan baik oleh petani untuk mewujudkan produk pertanian yang memiliki kemampuan daya saing yang tinggi, yang akan menjadikan Kabupaten Gowa siap menghadapi tantangan yang di sentralisasikan dan mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk memperkuat daya saing Kabupaten Gowa.

Kacamatan Tinggimoncong merupakan salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Gowa yang sebagian besar penduduknya bermata

pencaharian sebagai petani maka dari itu peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja kelompok tani harus di tingkatkan melalui peran Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan kinerja serta produksifitas hasil pertanian perlu dilakukan pelatihan kelompok tani dan penambahan Pengawas Penyuluh Lapangan (PPL) yang ada sekarang belum bisa bekerja secara maksimal dikarenakan jumlah Pengawas Penyuluh Lapangan (PPL) sangat terbatas yang mempengaruhi kinerja serta produksifitas petani pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian juga sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan produksifitas pertanian.

Melihat dan mengamati kinerja kelompok tani yang berada di Kecamatan Tinggimoncong saat ini belum optimal karena kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong masih belum merata masih ada Desa atau Kelurahan yang belum memiliki kelompok tani menyebabkan kemampuan kelompok tani masih rendah yang dibuktikan bahwa kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas, kelompok tani belum mampu memupuk modal, kelompok tani belum mampu mencari dan memanfaatkan informasi serta menjalin kerjasama dengan kelompok tani lainnya, walaupun disisi lain kelompok telah mampu merencanakan kegiatan dengan rekomendasi yang tepat. Pembinaan kelompok tani tidak lain adalah sebagai upaya percepatan dan peningkatan sasaran. Petani yang banyak jumlahnya dan tersebar di pedesaan yang luas, sehingga dalam peningkatan kinerja kelompok tani di harapkan timbulnya cakrawala dan wawasan

kebersamaan memecahkan dan merubah citra kelompok tani sekarang menjadi usaha tani masa depan yang cerah dan tegar.

Peningkatan kualitas produksi sangat di perlukan guna mensejahterakan kelompok tani dan peningkatan swasembada pangan, peningkatan sumber daya manusia juga perlu di perhatikan karena pengolahan lahan yang belum maksimal dapat menurunkan hasil produksi pertanian, kelompok tani dalam hal ini sangat memerlukan bantuan dan arahan dari Dinas Pertanian guna meningkatkan produksi pertanian. Sampai saat ini bantuan pemerintah dalam bidang pertanian masih belum memadai sehingga menyebabkan produksi pertanian belum maksimal.

Berdasarkan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk membuat penelitian tentang *“Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja Kelompok Tani ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kinerja Kelompok Tani?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja kelompok tani
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kinerja kelompok tani

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis

Penelitian di harapkan akan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadikan bahan tinjauan untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

2. Secara Teoritis

Penelitian dapat memberikan kegunaan bagi instansi yaitu pemerintah kecamatan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah daerah adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, mengakui otonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada daerah melalui Pemerintah Daerah dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 maka Pemerintahan dalam tatanan Pemerintah Daerah dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan

Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

Di daerah di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberdayakan masyarakat Desa. Kepala Daerah wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun harus memberi peluang kepada masyarakat untuk menanyakan dan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang di maksud.. Oleh karena itu Pemerintah Daerah atau yang di sebut dengan nama lain adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

Alokasi Dana Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk daerah, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat bersama Kepala Daerah.

Berikut ini adalah beberapa pengertian dan definisi daerah:

1. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 bahwa Daerah adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat dan hukum yang

mempunyai organisasi pemerintahan dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

2. Saniyanti (2007), menurutnya bahwa Daerah merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa Daerah adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (diketuai oleh seorang Kepala Daerah).

B. Konsep Peran

Peran berasal dari kata peran yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan juga diartikan sebagai suatu kelakuan yang diharapkan dari oknum dalam antar hubungan social tertentu yang berhubungan dengan status sosial tertentu. Melihat pengertian ini, jika dikaitkan dengan pengertian peranan dalam Pemerintahan Kecamatan adalah tugas dan wewenang pemerintah kecamatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka harus menjalankan peranannya. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Soekanto (2002 :243). Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan tertentu (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak tertentu serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan peranannya.

Peranan menurut (Lavinson, dalam Soekanto, 2002). Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur social masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang

dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatn.

Sering kurang dipahami bahwa dalam arti yang sesungguhnya, setiap pejabat pimpinan dalam organisasi merupakan manajer sumber daya manusia artinya, para manejer ikut dan harus terlibat dalam mengambil berbagai langka manajemen sumber daya manusia, mulai dari perencanaan ketenga kerjaan hingga pensiunan pegawai (Lavinson, dalam Soekanto 2002).

Akan tetapi biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebut yang secara fungsional bertanggungjawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam menejemen sumber daya manusia. Terdapat dua alasan kuat mengapa satuan kerja fungsional demikian perlu dibentuk. Pertama, meskipun bahwa setiap manejer yang bersangkutan disertai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, baik yang sifatnya tugas pokok maupun tugas penunjang, sehingga perhatian utamanya ditujukan kepada tanggungjawab fungsional itu. Kedua, dewasa ini manejemen sumber daya manusia mutlak perlu ditangani secara propessional oleh tenaga-tenaga spesial karena hanya dengan demikianlah manejemen sumber daya manusia yang sangat kompleks itu dapat ditangani dengan baik. Dari beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan perilaku, tugas yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa. (Siagian, 2001:31).

Menurut penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu pola sikap, nilai dan tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya dimasyarakat. Sedangkan posisi tersebut merupakan identifikasi dari status atau tempat seseorang dalam suatu sistem sosial dan merupakan perwujudan dan aktualisasi diri. Peran juga diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan oleh lingkungan social berhubungan dengan fungsi individu dalam berbagai kelompok social (Siagian 2001:31).

C. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan.
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Fungsi pemerintah dalam kaitanya peningkatan kinerja yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta di bebaskan oleh masyarakat. Perlu adanya peran Pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran Pemerintah yang di maksud antara lain :

1. pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyampaikan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan.

2. pemerintah sebagai dinamisor

Peran pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat.

D. Konsep Kinerja

Menurut terminologi kinerja merupakan suatu istilah dalam manajemen yang didefinisikan melalui perspektif atau sudut pandang yang berbeda oleh para ahli. 10 Konseptualisasi tersebut sangat bergantung dari implementasi di institusi apa pengertian tersebut ditempatkan.

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly dalam Amins (2012:14), kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Batasan tersebut

mengandung makna bahwa kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Hal yang sama dinyatakan Rivai dan Basri dalam Amins (2012:42), bahwa kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama.

Sedangkan Harsey dan Blanchard dalam Amins (2012:12), menyatakan kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.

Bastian dalam Fahmi (2011:2) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Menurut Lawler dan Porter dalam Sutrisno (2011:170), yang menyatakan bahwa kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Prawirosentono dalam Sutrisno (2011:170), mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-

masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Menurut Miner dalam Sutrisno (2011:170), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Lebih tegas lagi Cormick dan Tiffin dalam Sutrisno (2011:172), mengemukakan kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas adalah bagaimana seseorang dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, kedisiplinan dan ketepatan. Waktu kerja adalah mengenai jumlah absen yang dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang telah dijalani.

Sebagaimana definisi-definisi tersebut diatas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah sebagai ekspresi potensi berupa perilaku atau cara seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas sehingga menghasilkan suatu produk yang merupakan wujud dari semua tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan kepadanya.

Kinerja merupakan upaya aktivitas dalam menghasilkan output optimal berdasarkan pengembangan kerja yang terarah, terorganisir dan berkesinambungan untuk mencapai substansi kinerja. Substansi kinerja yang dimaksud adalah efisien, efektif, berkualitas dan kuantitas. Hal ini yang menjadi acuan definisi berbagai organisasi dalam mendefinisikan kinerja secara luas. Hal ini jelas bahwa kinerja dalam berbagai batasan memberikan

cakupan bagaimana suatu kegiatan kerja harus berada dalam koridor manajemen dan administrasi yang diselaraskan dengan target-target pencapaian optimal, yang disadari atas disiplin kerja.

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.

Evaluasi kinerja adalah metode penilaian terhadap pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai tujuan atau standar kinerja yang telah ditetapkan lebih dahulu. Menurut Handoko (2010:1) evaluasi kinerja adalah proses melalui penilaian dan pembahasan kinerja yang pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Tujuan dari evaluasi kinerja secara umum adalah menghasilkan informasi yang akurat dan sah berkenaan dengan perilaku kerja pekerja. Tujuan tersebut biasanya digolongkan ke dalam tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan.

Menurut Miner dalam Sutrisno (2011:172), mengemukakan secara umum dapat dinyatakan empat aspek dari kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kualitas yang dihasilkan, menerangkan tentang jumlah kesalahan, waktu, dan ketepatan dalam melakukan tugas.
2. Kuantitas yang dihasilkan, berkenaan dengan berapa jumlah produk atau jasa dapat dihasilkan.

3. Waktu kerja, menerangkan akan berapa jumlah absen, keterlambatan, serta masa kerja yang telah dijalani individu pegawai tersebut.
4. Kerjasama, menerangkan akan bagaimana individu membantu atau menghambat usaha dari teman sekerjanya.

Dengan keempat aspek diatas dapat dikatakan bahwa individu mempunyai kinerja yang baik apabila dia memenuhi keempat aspek tersebut sesuai dengan target atau rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Swanson dan Graudous dalam Sutrisno (2011:173), menjelaskan bahwa dalam sistem, berapapun ukurannya, semua pekerjaan saling berhubungan. Hasil dari seperangkat kinerja pekerjaan adalah masukan bagi usaha kinerja lainnya. Karena saling bergantung, apa yang tampaknya merupakan perolehan kinerja yang kecil dalam suatu aspek pekerjaan dan menghasilkan perolehan besar secara keseluruhan. Jadi produktivitas suatu sistem bergantung pada kecermatan dan perilaku kerja.

Menurut Mahsun dalam Sedarmayanti (2009: 198) bahwa indikator kinerja terdiri dari:

1. Pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas.
2. Tingkat keterampilan pendidikan yang sesuai dengan bidang kerja.
3. Kehadiran/keterlambatan.

Wibowo (2010:16), menyatakan bahwa dalam peningkatan kinerja suatu organisasi bergantung pada sumber daya manusia didalamnya, baik sebagai individu maupun sebagai tim. Sumber daya manusia adalah aset bagi organisasi. Untuk itu, organisasi yang cerdas dan berkeinginan meningkatkan

kinerjanya, harus berupaya mengembangkan sumber daya manusianya secara berkesinambungan.

Sedangkan standar pengukuran prestasi kerja dikemukakan oleh Lopes dalam Sutrisno (2011:180), yaitu:

1. Kuantitas kerja.
2. Kualitas kerja.
3. Pengetahuan tentang pekerjaan.
4. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan.
5. Keputusan yang diambil.
6. Perencanaan kerja .
7. Daerah organisasi kerja.

Menurut Pramutadi dalam Amins (2012:50), indikator kinerja terdiri dari:

1. Efisiensi, merupakan keterkaitan antara masukan dalam bentuk sumberdaya, proses dan menunjukkan derajat kehematan penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan proses. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara jumlah sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan jumlah sumberdaya yang ada.
2. Produktivitas, merupakan keterkaitan antara proses dan keluaran (dalam hal ini hasil), dan menunjukkan jumlah satuan hasil yang terjadi karena suatu proses tertentu, dihitung berdasarkan penggunaan sumber daya tertentu.

3. Efektivitas, merupakan keterkaitan antara hasil dan tujuan, serta menunjukkan derajat kesesuaian antara yang dinyatakan sebagai tujuan dengan hasil yang dicapai.
4. Akuntabilitas, menyangkut pertanggungjawaban penggunaan sumber daya berdasarkan standar dan norma yang berlaku.

Sedangkan menurut Umar dalam Mangkunegara (2012:18), membagi aspek-aspek kinerja sebagai berikut: 1.) Mutu pekerjaan, 2.) Kejujuran Karyawan, 3) Inisiatif, 4) Kehadiran, 5) Sikap, 6) Kerjasama, 7) Keandalan, 8) Pengetahuan tentang pekerjaan, 9) Tanggung jawab, 10) pemanfaatan waktu kerja. Nawawi (2006:12), indikator kinerja dalam melaksanakan pekerjaan di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan mencakup lima unsur sebagai berikut: 1) kuantitas hasil kerja yang dicapai, 2) kualitas hasil kerja yang dicapai, 3) jangka waktu mencapai hasil kerja tersebut, 4) kehadiran dan kegiatan selama hadir di tempat kerja, 5) kemampuan bekerjasama.

Lebih lanjut, Robbins dalam Amins (2012:46), menyatakan bahwa pencapaian tujuan yang telah ditetapkan merupakan satu tolak ukur kinerja individu. Ada tiga kriteria dalam melakukan penilaian kinerja individu, yakni:

1. Hasil Kerja

Hasil kerja individu tergantung pada perilaku seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Untuk mengukur hasil kerja individual maka yang dievaluasi adalah hasil tugas dari seseorang atau produk apa yang dihasilkan. Umumnya hasil kerja individu berupa data atau informasi, jasa dan benda. Evaluasi pengukurannya berupa kuantitas dan kualitas yang

dihasilkan. Kualitas dilihat dari ketepatan, keterampilan, ketelitian dan kerapian hasil kerja. Kuantitas dilihat dari jumlah keluaran atau seberapa cepat seseorang dapat menyelesaikan tugas-tugas ekstra atau mendesak.

2. Perilaku

Adapun pengertian perilaku disini adalah perilaku yang sering dilakukan dan berkaitan dengan tugas yang harus ia lakukan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengukur kinerja berdasarkan perilaku kerja dapat dilakukan dengan mengevaluasi aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dalam kaitannya dengan pekerjaannya atau bagaimana karyawan mengerjakan pekerjaannya. Pengukuran berdasarkan perilaku akan menghasilkan obyektivitas, yaitu keluaran yang mampu dihasilkan karyawan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

3. Ciri Individu

Ciri individu merupakan sifat bawaan seseorang yang mencakup antara lain percaya diri, dapat diandalkan, dapat bekerjasama, dan berpengalaman. Untuk pengukuran kinerja berdasarkan ciri individu dapat dilakukan dengan mengukur prestasi kerja berdasarkan fungsi karyawan.

Secara terpisah Pasolong dalam Surjadi (2009:22) mengatakan bahwa kinerja mempunyai beberapa element yaitu:

- a) Hasil kerja dicapai secara individual atau secara institusi, yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau kelompok.

- b) Dalam melaksanakan tugas, orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindaklanjuti, sehingga pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik.
- c) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d) Pekerjaan tidaklah bertentangan dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai moral dan etika yang berlaku umum.

E. Konsep Kinerja Kelompok Tani

kinerja kelompok tani didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 41/Kpts/OT. 210/1992 antara lain kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usahatani (termasuk pasca panen dan analisis usahatani) dengan menerapkan rekomendasi yang tepat dan manfaat sumber daya alam secara optimal, penyuluhan dan pendampingan, kemampuan melaksanakan dan menaati perjanjian dengan pihak lain, kemampuan memupuk modal dan memanfaatkannya secara rasional, kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok, kemampuan menerapkan teknologi dan memanfaatkan informasi serta kerja sama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usahatani anggota kelompok tani. Indikator kinerja kelompok tani dapat ditinjau dari delapan tolak ukur yang terdiri atas usia kelompok tani; lamanya masa

keanggotaan; luas areal usaha tani; bidang usaha; kerjasama yang dilakukan dalam kelompok tani; aset yang dimiliki; hubungan kelompok tani dengan kelembagaan disekitarnya; dan persepsi petani terhadap usaha tani yang telah dilaksanakan (Wahyuni, 2003; 2).

Dalam pelaksanaan kinerja maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok tani tersebut yang bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu kelompok tani berhasil melaksanakan program-program dan mencapai tujuannya. Evaluasi merupakan suatu proses penelitian sistematis atau yang teratur tentang manfaat atau guna beberapa objek. Evaluasi memiliki beberapa pendekatan diantaranya: pendekatan experimental; pendekatan yang berorientasi pada tujuan; pendekatan yang berfokus pada keputusan; pendekatan yang berorientasi kepada pemakai; pendekatan yang responsif; dan evaluasi bebas tujuan (Tayibnaps, 2008; 3).

F. Konsep Kelompok Tani

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.237/Kpts/OT.160/4/2007 Kelompok Tani adalah kumpulan petani dan pekebun yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok Tani akan membentuk komunitas petani dalam rangka mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obatan. Dengan adanya Kelompok Tani biaya pengadaan sarana produksi pertanian dapat di tanggung bersama dan dalam kelompok tani memiliki

kekuatan untuk menentukan harga hasil pertanian anggotanya. Adapun ciri-ciri Kelompok Tani sebagai berikut :

1. Beranggotakan petani dan pekebun.
2. Hubungan antara anggota erat, saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota.
3. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam mengelola usaha tani dalam kelompok tani.
4. Mempunyai kesamaan jenis komoditas usaha dan memiliki kesamaan dalam tradisi atau pemukiman, hamparan usaha, status ekonomi, sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
5. Usaha tani yang merupakan sebuah fungsi dan bisnis.
6. Mempunyai tujuan yang sama dan pembagian tugas serta tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Purwanto (2007), kelompok tani adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama, dengan demikian kelompok tani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Beranggotakan petani-nelayan;
2. Hubungan antara anggota erat;
3. Mempunyai pandangan, kepentingan yang sama dalam mengelolah usahatannya;
4. Mempunyai kesamaan jenis komoditas usaha;
5. Usahatani yang diusahakan merupakan sebuah ikatan fungsional/bisnis;

6. Mempunyai tujuan yang sama.

G. Kerangka Pikir

Peran Pemerintahan Kecamatan seperti tersebut di atas, maka Pemerintah Kecamatan mempunyai peranan dan tanggung jawab yang sangat berat karena selain menyelenggarakan urusan pemerintahan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggara tugas umum Pemerintah.

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pertanian terdapat beberapa unsur yaitu Pemerintah Daerah, penyuluh dan petani. Pemerintah Daerah berperan melalui pelaksanaan program-program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan penyuluh berperan sebagai penyambung program-program Pemerintah Daerah agar sampai kepada petani dan pendampingan petani dalam proses meningkatkan kinerja kelompok tani.

Pemerintah Daerah dan penyuluhan lapangan diharapkan berperan serta, untuk meningkatkan kontribusi di bidang pertanian, dalam rangka menuju perubahan kearah produktifitas yang lebih baik, maka di perlukan pendampingan seorang penyuluhan pertanian.

Permasalahan umum yang kerap terjadi dimasyarakat antara lain tidak didukung oleh sistem yang menunjang, sebagian besar petani memakai cara

tradisional tidak di dukung oleh aspek teknologi, manajemen serta pendanaan yang kurang memadai.

Adanya kelembagaan petani ini tentunya para kelompok tani yang ada dalam suatu wadah tersebut bisa memperoleh kerja sama dalam mengelola usaha tani dalam peningkatan produktifitas. Sehubungan dengan program dari pemerintah tersebut, maka saat ini Pemerintah Kecamatan melaksanakan kegiatan berdasarkan regulasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.

Sebagai obyek program peningkatan kinerja masyarakat kecamatan yang bertujuan untuk memberikan manfaat dari hasil dan kemajuan yang dicapai dari proses peningkatan kinerja. Dalam usaha peningkatan kinerja tersebut di perlukan peran Pemerintah Daerah. Kerangka pikir penelitian di gambarkan dengan skema sebagai berikut:



H. Fokus Penelitian

Menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

I. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja Kelompok Tani adalah perangkat pemerintah di Kabupaten Gowa yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.
2. Pelatihan Sumber daya Manusia merupakan usaha Pemerintahan dalam meningkatkan kinerja seseorang dalam peningkatan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.
3. Penyuluhan dan pendampingan yaitu agar petani dapat melakukan tata cara budidaya, pengelolaan, dan pemasaran yang baik, kemudian menganalisis usaha dan kemitraan dengan pelaku usaha .
4. Penyediaan fasilitas pembiayaan teknologi dan permodalan yaitu agar masyarakat petani mudah untuk mencari tahu produk pertanian apa saja yang cocok untuk lahan mereka dan untuk mempermudah masyarakat petani dalam mengelola lahan pertaniannya
5. Faktor pendukung yang dimaksud disini adalah adanya sarana kerja sama yang baik di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

6. Faktor penghambat yaitu minimnya sumber daya pengetahuan masyarakat petani, kurangnya penyuluhan bagi masyarakat serta kondisi penduduk yang belum memahami dan memanfaatkan teknologi dan informasi.
7. Produksi dalam hal ini yaitu meningkatkan hasil panen petani dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada. Kualitas hasil panen harus dapat meningkatkan dari tahun ke tahun agar ada perbandingan peningkatan kinerja kelompok tani.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa (Dinas Pertanian). Topik penelitian ini yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Gowa karena data ataupun dokumen-dokumen dapat di peroleh dari Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, penelitian ini berlangsung dua bulan setelah seminar proposal.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang telah ditetapkan.

1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pelaksanaan peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja Kelompok Tani di Kecamatan ~~tinggimonconmg~~ kabupaten Gowa.

2. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan oleh penulis adalah tipe fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang pernah dialami oleh informan.

C. Sumber data

Dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu :

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil observasi yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya di lapangan.
- b) Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi

Observasi yang akan dilakukan adalah kunjungan langsung ke kantor Dinas Pertanian meninjau dan melihat program program pertanian yang telah di laksanakan melihat hasil kegiatan dari Dinas Pertanian dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati tentang perilaku kebiasaan dalam Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

2). Wawancara

Dalam proses penelitian diperlukan adanya persiapan wawancara. Persiapan wawancara tak terstruktur dapat diselenggarakan menurut tahapan-tahapan tertentu yakni sebagai berikut. Tahap pertama, ialah menemukan siapa yang akan diwawancarai di antaranya yaitu kepala Dinas Pertanian Kabupaten atau yang mewakili Gowa, ketua kelompok tani Pangajiang dan Ketua Kelompok tani bulo, dan ketua Penyuluh pertanian lapangan dan ketua kelompok tani Saluttowa. Barangkali pada suatu saat pilihan hanya berkisar di antara beberapa orang memenuhi persyaratan. Tahap kedua, ialah mencari tahu bagaimana cara yang sebaiknya untuk mengadakan kontak dengan informan. Karena informan adalah orang-orang pilihan, dianjurkan agar jangan membiarkan orang ketiga menghubungi, tetapi peneliti sendirilah yang melakukannya. Tahap ketiga, mengadakan persiapan yang matang untuk melakukan wawancara.

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, literatur dan sebagainya.

E. Informan

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini, penulis menetapkan informan kunci diambil dari Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Kabupaten Gowa serta aparat-aparat terkait dalam hal ini adalah dengan hal ini di gambarkan dalam table sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pertanian atau yang mewakili	1 orang
2.	Ketua Penyuluh pertanian lapangan	1 orang
3.	Ketua Kelompok Tani Saluttowa	1 orang
4.	Ketua Kelompok Pangajiang	1 orang
5.	Ketua Kelompok Tani Bulo	1 orang
6.	Ketua kelompok Pakua	1 orang
	Jumlah	6 orang

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan

masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Triangulasi bermakna yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidak akuratannya.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengumpulan data penelitian melakukan wawancara dengan informan dalam kondisi waktu yang berbeda untuk menentukan kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Obyek Penelitian

Sebelum memulai pembahasan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Di kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Penulis akan memaparkan mengenai monografi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

a. Dinas Pertanian Kabupaten Gowa

Dinas Pertanian Kabupaten Gowa terletak di jalan Jl. Mesjid Raya No. 30, Sungguminasa berada pada ruang lingkup kantor Bupati Gowa, bagian timur Kabupaten Gowa membentang gunung bawakaraeng dan bagian tenggara dengan gunung lompobattang yang merupakan kawasan potensial untuk pengembangan pariwisata dan komoditi Hortikultural dataran tinggi, perkebunan, ternak dan lain-lain, sedangkan bagian barat terhempas dataran rendah yang potensi pengembangan tanaman seperti (padi, palawija, buah-buahan dan sayur-sayuran di dataran rendah) ternak, mina padi dan lain lain yang kesemuanya ini dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Wilayah administrasi kabupaten gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 km atau dengan 3,01 % dari luas wilayah provinsi sulawesi selatan.

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan

dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, tompobulu dan biringbulu. Dari total luas kabupaten Gowa 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai.

Kabupaten Gowa merupakan wilayah dengan potensi sumberdaya lahan beragam, mulai dari pertanian pangan dan hortikultural yang cukup besar harus mampu memberikan peran yang cukup besar sehingga pertanian tertujuan pada peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan di tunjang dengan sumberdaya alam yang memadai.

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke depan diharapkan dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat petani sebagai pelaku utama dan pelaku usaha dalam pembangunan kegiatan agribisnis dan agroindustri serta mendukung tercapainya swasembada pangan berkelanjutan, melalui pelaksana program peningkatan produksi beras Nasional (P2BN), peningkatan produksi penjualan di atas 5%, serta Gerakan optimalisasi jagung.

Program penyuluhan pertanian tanaman pangan dan hortikultural merupakan salah satu wujud perencanaan partisipatif masyarakat petani, memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan memanfaatkan potensi wilayah dengan dukungan program pada instansi terkait.

Program penyuluhan merupakan rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan yang dilakukan setiap tahun. Dasar penyusunan program penyuluhan pertanian, peraturan Menteri Pertanian nomor 25/Peraturan menteri/O.T140/5/2009. Manfaat Program Penyuluhan Pertanian, program penyuluhan pertanian tahun 2016 ini bermanfaat:

1. Untuk referensi bagi kepala bidang, seksi dalam mengelola kegiatan/program yang ada di lingkup dinas Pertanian Kabupaten Gowa ; bantuan pusat, propinsi dan Daerah (APBN, APBD dan bantuan lainnya).
2. Sebagai bahan acuan bagi penyuluh pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing.
3. Berfungsi sebagai bahan dokumentasi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.

Potensi pengembangan pertanian, penggunaan tanah di kabupaten Gowa dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Penggunaan lahan sawah (pengairan teknis, setengah teknis, pengairan desa sawah tadah hujan) pada musim hujan untuk tanaman padi sedangkan pada musim kemarau untuk tanaman padi, palawija, dan sayuran. Luas lahan sawah 34,125,48 Ha (18,12%) dari Kabupaten Gowa.

2. Penggunaan lahan kering terdiri dari pekarangan, ladang 42.722 Ha (22,68 %) dari luas kabupaten Gowa yaitu dapat ditanami palawija dan hortikultural.
3. Penggunaan lahan sawah khususnya dataran rendah yaitu untuk bangunan dan pemukiman. Hal ini dari tahun ketahun terjadi pengurangan lahan sawah.

Pelayanan penyuluhan jumlah tenaga penyuluh pertanian yang mengadakan/menyelenggarakan penyuluhan pertanian di kabupaten Gowa pada 18 kecamatan dengan jumlah 121 desa dan 46 kelurahan serta dinas pertanian Gowa adalah SATMIKAL. Jumlah penyuluh pertanian sebanyak 128 orang yng terdiri dari:

1. Fungsional penyuluh di kabupaten sebanyak 10 orang
2. Di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 54 orang PNS
3. THL TBPP sebanyak 65 orang

adapun Visi dan Misi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa sebagai berikut:

Visi adalah cara pandang jauh kedepan agar intansi pemerintahan dapat eksis, antisipatif dan inovatif guna mempertahankan eksistensi dan keunggulan dalam era persaingan yang semakin ketat dan perubahan yang sangat cepat dengan tahapan yang konsistensi dan berkelanjutan.

Tahapan dalam rangka perubahan yang dimaksud dimulai dengan perumusan visi dinas pertanian yang jelas dengan dasar rumusan :

1. Mencerminkan apa yang ingin di capai
2. Memberikan arah dan fokus strategis

3. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam organisasi.
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya.
5. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
6. Mampu menjamin kesenimbangan kepemimpinan organisasi.

Dengan acuan sebagaimana tersebut diatas, dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi serta dirumuskan dalam visi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa sebagai berikut : **“Terwujudnya Produksi Pertanian Berkualitas dan Swasembada Pangan Menuju Masyarakat Sejahtera”**.

Sebagai langkah lebih lanjut untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut di atas amak di rumuskan pula tentang misi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa yang jelas dan Tegas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi yang ingin di capai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih.

Penetapan misi Dinas Pertanian Kabupaten Gowa memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stekholders) yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultural.

2. Peningkatan intensitas pertanian dan penerapan paket teknologi
3. Meningkatkan daya saing produk pertanian dengan perbaikan penanganan pasca panen tanaman mendukung swasambada pangan.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta memperkuat kelembagaan pertanian.

Mengacu pada visi misi Dinas Pertanian, maka dirumuskan untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil pertanian guna memenuhi kebutuhan daerah serta ketahanan pangan masyarakat sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktivitas padi, palawija, dan hortikultural.
2. Meningkatkan pertanaman padi, palawija dan hortikultural
3. Mengurangi kehilangan hasil dengan perlakuan pasca panen yang tepat
4. Meningkatkan ketahanan pangan dengan menanam beberapa jenis tanaman.

Strategi pelaksanaan program kerja dan sarana prasarana Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu dan intensifikasi dengan penerapan paket teknologi sesuai rekomendasi teknis
2. Perluasan areal tanam melalui peningkatan Intansi Pertanian dan tumbanghari
3. Pengadaan alat perontok padi dan alat pemipil jagung

4. Memanfaatkan lahan sesuai pola tanam yang ada dengan komoditi padi, palawija, dan holkultural.

Uraian program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gowa.

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
- Pelayanan administrasi ketatausahaan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan Dinas/Oprsonal
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5. Program peningkatan kesejahteraan petani

- Peningkatan kemampuan lembaga tani

6. Program peningkatan ketahanan pangan

- Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
- Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
- Pengembangan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian
- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
- Pengembangan diversifikasi tanaman
- Pengembangan pertanian pada lahan kering
- Pengembangan perbenihan/perbibitan
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
- Pengembangan pembenihan/perbibitan kentang
- Pengembangan perbenihan, perbibitan, tanaman hias

7. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian atau perkebunan

- Pengadaan sarana dan prasaran teknologi pertanian atau perkebunan tepat guna
- Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian perkebunan tepat guna
- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi

- Pertanian/perkebunan tepat guna pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna.

8. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

- Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan

9. Program pendampingan kegiatan

- Pendampingan peningkatan kapasitas P3A dan GP3A bidang teknis pertanian
- Peningkatan pengelolaan kelembagaan irigasi partisipatif

b. Keadaan Usaha Tani

Produksi padi, palawija, buah-buahan dan sayur-sayuran Kabupaten Gowa Tahun 2014 dan 2015 (dalam kwintal).

No	komoditi	Tahun 2014	Tahun 2015	Keterangan
A.	Padi	352.887	380.458	
B.	Palawija			
1.	Jagung	234.764	241.778	
2.	Kedelai	2.583	2.136	
3.	Kacang tanah	814	1.010	
4.	Kacang hijau	2.676	2.460	
5.	Ubi kayu	246.072	225.432	
6.	Ubi jalar	5.564	5.072	
C.	Buah-buahan			
1.	Alpukat	146.863	1.995.150	

2.	Mangga	226.261	2.647.460	
3.	Rambutan	135.223	1.395.720	
4.	Lansat	45.438	5.060.400	
5.	Jeruk	20.813	54.110	
6.	Durian	30.339	6.738.100	
7.	Semangka	320	660	
8.	Markisa	163.194	764.510	
D.	Sayur-sayuran			
1.	Bawang merah	888	85	
2.	Bawang daun	39.062	8.920	
3.	Kentang	136.460	14.535	
4.	Kubis/kol	48.175	4.771	
5.	Pete	36.959	5.720	
6.	Wortel	43.852	7.712	
7.	Kacang panjang	49.151	3.399	

c. Kondisi Geografis Kecamatan Tinggimoncong

Kecamatan Tinggimoncong merupakan salah satu Kecamatan yang tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa, yang merupakan penyangga utama Kota Makassar adalah salah satu daerah yang istimewa dibanding dengan daerah lainnya. Industri hortikultura, industri perkebunan dan industri agrowisata sudah merambah ke daerah ini, khusus di daerah Malino, Ibukota Kecamatan Tinggimoncong adalah

primadona perpariwisataan di Sulawesi Selatan. Daerah yang berada diatas ketinggian 1.500 DPL, ini juga pemasok utama tanaman hortikultura ke Kota Makassar dan sekitarnya, bahkan hasil dari perkebunan ini sebahagian sudah di ekspor kebeberapa negara di Asia dan Eropa. Keadaan geografisnya di Kecamatan Tinggimoncong memang indah dan khas Ketinggian kecamatan Tinggimoncong berkisar 500 meter dari permukaan laut. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Fergusson bahwa dikecamatan Tinggimoncong memiliki jumlah rata – rata bulan basah 9 (>100mm) dan rata – rata bulan kering 3 (<65mm) termasuk dalam tipe iklim C. Kecamatan Tinggimoncong memiliki curah hujan tertinggi pada bulan Desember, Januari, Februari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus dan September. Kecamatan Tinggimoncong yang terdiri dari beberapa wilayah yang meliputi Desa Parigi, Desa Bulutana, Desa Bontolerung, Kelurahan Pattapang, Kelurahan Malino, Kelurahan Gantarang dan Desa Garassi.

d. Jumlah Penduduk Kecamatan Tinggimoncong

Penduduk yang tersedia dalam hal kuantitas merupakan potensi yang cukup besar dalam membangun suatu daerah. Kekurangan jumlah penduduk akan mempersulit jalannya suatu proses pembangunan sebab penduduk disamping sebagai obyek pembangunan juga berfungsi sebagai subyek pembangunan. sebagai obyek merupakan faktor yang sangat penting, disamping merupakan dalam suatu proses penduduk. Dari tahun ketahun penduduk di Kecamatan Tinggimoncong meningkat di lihat dari

perbandingan dari tahun 2014 jumlah penduduk 23.836 jiwa di tahun 2015 jumlah penduduk meningkat menjadi 23.836 jiwa dan di tahun 2016 jumlah penduduk lebih meningkat menjadi 24.994 jiwa. Kualitas penduduk adalah hal yang mutlak harus dilakukan, sebab penduduk adalah titik sentral faktor produksi lainnya atau sebagai motor penggerak dari faktor-faktor produksi lainnya.

e. Daftar nama kelompok tani Di Kecamatan Tinggimoncong

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa memiliki jumlah kelompok tani sebanyak 30 kelompok tani sesuai daftar tabel yang telah di sajikan. Daftar tabel sebagai berikut :

No	Nama Kelompok Tani	Komoditi Unggulan
1.	Veteran	Kentang, wortel, tomat, strawberi, bwng daun Kentang, kubis, tomat
2.	Tunas Muda	Tomat, Markisa
3.	Pangajiang	Kopi, kakao
4.	Bulo	Kopi, kakao, padi
5.	Pakua	Kopi, kakao
6.	Saluttowa	Kopi, kakao, padi
7.	Alam segar	Kentang, Kubis, Tomat
8.	Buluballea	Kentang, Kubis, Tomat
9.	Ta'sa'la	Kentang, Kubis, Tomat

10.	Kayu putihah	Kentang, Kubis, Tomat
11.	Bina Mandiri	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
12.	Wabita Tani Beringin	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
13.	Wanita Tani	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
14.	Wanita Tani kenanga	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
15.	Wanita Tani mawar	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
16.	Wanita Tani Mawar Merah	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
17.	Wanita Tani safana	Kentang, kubis, tomat, tnm hias
18.	Wanita Tani Anugrah	Kentang, kubis, tomat
19.	Pattiro-tiroang	Kentang, kubis, tomat
20.	Turikale	Kentang, kubis, tomat
21.	Usagung Bawakaraeng	Kentang, kubis, tomat
22.	Mutiara Tani	Kentang, kubis, tomat
23.	Makmur Tani	Kentang, kubis, tomat
24.	Wira Jaya	Kentang, kubis, tomat
25.	Lembanna	Kentang, wortwl, markisa
26.	Dale Ta'bu	Tomat

27.	Maddako	Kentang, wortel, tomat
28.	Pemuda Veteran	Kentang, wortel, markisa, kopi
29.	Lemo-lemo	Kentang, wortel, tomat
30.	Pattapang	Kentang, wortel, strawberry

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kinerja Kelompok Tani

Salah satu karakteristik dalam pembangunan ekonomi adalah pergeseran jangka panjang populasi dan produksi dari sektor pertanian menjadi sektor industrialisasi. Konsep strategi pembangunan berimbang (*balanced growth*), yaitu pembangunan disektor pertanian dan sektor industri secara bersamaan merupakan tujuan pembangunan yang paling ideal. Pada kenyataannya konsep strategi pembangunan berimbang tidak dapat dilakukan oleh negara berkembang, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak memadai untuk melakukan pembangunan dibidang pertanian dan bidang industri sekaligus.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam bidang pemerintahan merupakan salah satu bentuk kegiatan aparat pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi mengenai pelaksanaan fungsi tersebut. Pemerintah daerah mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kemajuan dan perkembangan wilayah yang dipimpinnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam

meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan khususnya dibidang pertanian.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dan penyuluh pertanian mengidentifikasi masalah yang dihadapi petani di Kecamatan Tinggimoncong. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi: persiapan masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pertemuan-awal dan teknis pelaksanaannya, persiapan penyelenggaraan pertemuan, pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan, pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dideskripsikan tentang peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja kelompok tani yang secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Peran Dinas Pertanian Dalam Memberikan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam hal peran Berbagai cara dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Gowa diakui oleh sebagian warga terutama di Kecamatan Tinggimoncong sebagai area paling besar dalam pertanian Hortikultura. Melihat beberapa program dari Dinas Pertanian, telah berupaya sehingga beberapa persoalan dalam pertanian khususnya pertanian sayur, dapat menjawabnya. Seperti sarana-prasarana perkebunan, pemasaran, dalam

hal ini setiap melakukan panen sayur, kentang dan lain sebagainya, hasil-hasil panen tersebut dengan mudah dipasarkan. Meski demikian ada banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian terutama pertanian Hortikultura.

Peran Dinas Pertanian dalam Pemberdayaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan perilaku warga desanya untuk bekerja bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan yang di kehendaki. Terkait dengan hal tersebut, maka dapat dilihat peran tersebut sebagai berikut:

1. Pemberian Dukungan

Pemberian dukungan berupa pendampingan-pendampingan, pemberian informasi-informasi pasar dan permodalan. Kemudian pemberian motivasi-motivasi kepada kelompok tani.

2. Fasilitasi Kelompok Petani

Dilakukan dengan melakukan fasilitasi-fasilitasi berupa pendampingan pada kelompok-kelompok tani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka dan mengembangkan sumber dayanya.

3. Mengembangkan Jaringan

Membuka akses jaringan kepada permodalan seperti perbankan, akses pasar dan lainnya.

4. Memberikan Pelatihan

Melakukan pelatihan-pelatihan hortikultura terutama dalam penanaman perawatan, dan panen.

5. Management Financial

6. Pemerintah Dalam Menyelesaikan Permasalahan dan Beberapa Program Petani

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Gowa dan PPL pertanian Kecamatan Tinggimoncong menerapkan rencana kegiatan kelompok, rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping pelatihan SDM selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemberian bimbingan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan.

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris Dinas Pertanian oleh bapak "T" menyatakan bahwa:

“dengan melakukan pertemuan dengan para kelompok tani selaku Kepala Dinas Pertanian sering memprogramkan kegiatan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian seperti pelatihan sumber daya manusia yang biasa dilakukan setiap memasuki awal bulan tanam atau 1 kali dalam 3 bulan memberikan pengarahannya untuk memakai pupuk organik pada awal pertanamannya” (wawancara dilakukan 18 Agustus 2016)

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Petugas

Penyuluh Lapangan oleh bapak "H" menyatakan bahwa:

“di Kecamatan Tinggimoncong ini sering di lakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait peningkatan sumber daya manusia pelatihan di lakukan setiap awal musim tanam di hadiri oleh Pemerintah Daerah atau Kepala dinas pertanian ketua PPL setempat dan perwakilan setiap kelompok tani dan pelatihan terakhir di lakukan di bulan april 2016” (wawancara tanggal 20 agustus 2016)

Sebagaimana hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah selaku Kepala Dinas Pertanian telah bertemu langsung kepada petani membahas tentang masalah apa yang sedang dihadapi serta membantu petani menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut

Pernyataan ketua kelompok tani pangajiang oleh bapak “M” juga menyatakan bahwa:

“Petani disini sangat terbantu dengan adanya pelatihan sumber daya manusia karena dengan adanya pelatihan ini di saat awal bulan tanam para ketua kelompok tani dapat berdiskusi langsung dan menyampaikan segala masalah yang di hadapi saat memulai bercocok tanam misalnya dalam penanganan hama pada tanaman.” (Wawancara di lakukan 22 agustus 2016)

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua kelompok tani pakua oleh bapak “N” menyatakan bahwa:

“Kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan sumber daya manusia karena dapat membantu kami dalam pemecahan masalah, karena apabila ada tanaman yang terserang hama, penyuluh menyampaikan informasi kepetugas hama dan penyakit pada tanaman sekaligus memberikan nama racunnya” (wawancara di lakukan 22 agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok Bulu bapak “A” menyatakan bahwa:

”Dengan adanya pertemuan yang diadakan pemerintah terhadap petani disini itu sangat membantu menambah pengetahuan petani dalam hal penanganan masalah penyakit yang biasa timbul pada tanaman” (wawancara di lakukan 23 agustus 2016)

Pernyataan ketua kelompok tani saluttowa oleh bapak “K” juga menyatakan bahwa:

“dengan adanya pelatihan yang di berikan para petani sangat membantu di karenakan dapat membahas masalah masalah yang berhubungan dengan bibit pupuk yang cocok atau tidak cocok untuk tanaman” (wawancara di lakukan 23 agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa adanya pelatihan sumber daya manusia sangat membantu para petani dalam menangi masalah atau kendala yang di hadapi dalam meningkatkan hasil produksi pertaniannya.

b. Penyuluhan dan Pendampingan Kelompok Tani

Untuk mewujudkan pertanian tangguh yaitu pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing produk pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani maka diperlukan dukungan sumberdaya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan).

Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

Adanya suatu perencanaan program/kegiatan kelompok tani akan memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan atau termasuk warga masyarakatnya untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kecamatan Tinggimoncong melakukan pendampingan pada saat penyusunan rencana kegiatan kelompok Tani, program kegiatan harus dirancang dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat setempat dan kegiatan apa yang menurut pemerintah bersama masyarakat paling efektif demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Dalam melaksanakan pembimbingan di lapangan terhadap anggota kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong belum mampu menjangkau dalam satu minggu untuk melaksanakan pendampingan yang secara spesifik para anggota kelompok tani masih melakukan secara mandiri dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah. Selain itu kendala utama yang ditemui dilapangan bahwa tenaga pendamping yang ada sekarang masih kurang sehingga kurang mendapat solusi yang jelas ketika mendapat kendala teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Sekretaris Dinas Pertanian yang berinisial “i” menyatakan bahwa :

“Iya saya selalu terlibat dalam kunjungan lapangan dan ikut mengevaluasi sejauh mana perkembangan kegiatan yang di lakukan serta pada mengevaluasi memberikan pelatihan dan penyuluhan tentang holtikultura dalam penanaman perawatan dan panen .(wawancara dilakukan 18 agustus 2016).

Hal senada sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kecamatan Tinggimoncong oleh bapak “H” menyatakan bahwa:

“Dengan melakukan pendampingan lapangan, memberikan bimbingan mengenai paket teknologi baru kepada kelompok-kelompok tani yang

melakukan sekolah lapang dan melakukan pembinaan kegiatan tentang bagaimana pengolahan tanah yang baik, teknik penghamburan, jarak tanam serta pemupukan berimbang dan dilakukan pengamatan bagaimana mengenali suatu penyakit atau hama” (wawancara dilakukan 20 agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian Kecamatan Tinggimoncong terlibat mendampingi petani baik dalam melaksanakan musyawarah tani maupun mendampingi dalam pembuatan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua kelompok tani pangajiang oleh bapak “M” menyatakan bahwa:

“Iya sudah, tapi di Kecamatan Tinggimoncong ini masih kekurangan tenaga penyuluh dari pertanian mengingat tingkat kebutuhan kelompok tani sangat tinggi karena banyaknya kelompok tani yang ada”(wawancara di lakukan 22 agustus 2016)

Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani Pakua oleh bapak “N” menyatakan bahwa:

“Ya, pemerintah memang sudah melakukan kegiatan pendampingan lapangan, akan tetapi penyuluh yang ada masih kurang dan belum mampu membawahi kelompok tani yang ada di Kecamatan Tinggimoncong mengingat banyaknya kelompok tani disini”(wawancara 22 agustus 2016)

Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani bulo oleh bapak “A” menyatakan bahwa:

“Ya sudah, pelaksanaan dilapangan hingga saat ini, telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah mendapat respon yang baik dari petani, namun kendala besar yang dialami oleh petani bahwa kurangnya tenaga pembimbing dilapangan sehingga menyulitkan bagi petani untuk mendapatkan informan” (wawancara di lakukan 23 agustus 2016)

Hal senada juga disampaikan ketua kelompok Saluttowa oleh bapak

“A” menyatakan bahwa:

“Ya, akan tetapi kegiatan pendampingan yang dilakukan belum secara maksimal karena tenaga penyuluh yang disediakan tidak mencukupi mengingat kelompok tani disini cukup banyak” (wawancara di lakukan 23 agustus 2016)

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa para anggota kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong masih memerlukan tenaga pendamping lapangan untuk bisa lebih mendapat informasi-informasi terkait dengan usaha pertaniannya.

c. Pengadaan Modal dan Alat Sarana Prasarana untuk Kelompok Tani

Penyediaan sarana dan prasarana, yang menjadi pendukung pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global. Peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai pemerintah daerah dalam hal Dinas Pertanian Kabupaten Gowa berusaha memfasilitasi para petani dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja yang diadakan agar hasil produksi pertanian dapat meningkat. Pemerintah daerah dalam hal Dinas Pertanian Kabupaten Gowa memfasilitasi kegiatan kelompok tani dengan memberikan bantuan seperti benih/varietas unggul, pupuk anorganik, pupuk organik dan obat-obatan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis lakukan dengan salah satu sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gowa yang berinisial “i” menyatakan bahwa:

“Pemerintah telah memberikan bantuan berupa benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk seperti pupuk anorganik, pupuk organik dan obat-obatan bagi setiap kelompok tani yang melakukan kegiatan dan membuka akses jaringan kepada permodalan perbankan akses pasar dan lain-lainnya.” (wawancara dilakukan 25 agustus 2016)

Hal serupa di sampaikan oleh ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong yang berinisial “H” yang menyatakan bahwa :

“ Pemerintah telah memberikan bantuan berupa benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk seperti pupuk anorganik, pupuk organik dan obat-obatan bagi setiap kelompok tani yang melakukan kegiatan.” (wawancara dilakukan 20 agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah memberikan bantuan berupa varietas unggul, pupuk dan obat-obatan kepada masyarakat petani yang disesuaikan dengan komoditi yang dikembangkan oleh para petani di Kecamatan Tinggimoncong.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua kelompok tani Pangajiang olah bapak “M” mengatakan:

“Dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan yang dipakai pada lahan yang merupakan milik setiap kelompok tani”(wawancara dilakukan 22 agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan di sampaikan oleh ketua kelompok tani pakua oleh bapak “N” menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan bantuan mulai dari benih kemudian pupuk seperti pupuk anorganik dan pupuk organik serta obat-obatan yang dipakai dalam kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan” (wawancara di lakukan 22 agustus 2016).

Hal senada juga disampaikan ketua kelompok tani Bulu oleh bapak “A” menyatakan bahwa:

“Pemerintah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan seperti benih, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama dan penyakit yang dipakai dalam kegiatan peningkatan hasil panen para kelompok tani”

Pernyataan ketua kelompok tani saluttowa oleh bapak “K” juga menyatakan bahwa:

“Dalam kegiatan yang diadakan pemerintah itu memfasilitasi kebutuhan seperti benih unggul yang akan ditanam, kemudian pemerintah memberikan pupuk baik itu pupuk anorganik maupun pupuk organik serta obat-obatan yang dapat membasmi hama dan penyakit pada tanaman”(wawancara dilakukan 23 agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh petani dalam kegiatan rutin yang diadakan dan dengan adanya kegiatan peningkatan produksi dan pendampingan lapangan petani dapat membandingkan jumlah hasil produksi yang dicapai.

C. Kinerja Kelompok Tani

a. Produksi Dan Hasil Panen

Kinerja kelompok tani dapat di ukur dari hasil produksi dari tahun ketahun-tahun, melihat hasil panen, produksi sayur-sayuran kelompok tani dari tahun ketahun menurun di bandingkan komoditi pertanian yang lain maka dari itu, Pemerintah daerah mengeluarkan aturan pada saat selesai panen yaitu dimana hasil pertanian para petani dikumpulkan dan dijual. Aturan ini dibuat untuk bisa menyadarkan para petani untuk bisa memperhitungkan kerugian yang mereka alami dengan meminjam modal kepada tengkulak, tanpa memperhitungkan untung rugi yang mereka alami, diantaranya bunga yang lebih tinggi dan keharusan menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak meskipun dengan harga yang jauh dibawah harga standar di pasaran.

Sebagaimana hasil wawancara penulis lakukan dengan Sekretaris Dinas

Pertanian Kabupaten Gowa yang berinisial “I” menyatakan bahwa:

“Pemerintah memang banyak mengeluarkan aturan-aturan terutama pada saat selesai panen yaitu dimana hasil pertanian petani dikumpulkan kemudian dijual di karenakan produksi sayur-sayuran dari tahun-ketahun menurun di bandingkan dengan komoditi padi, palwija Dan buah-buahan” (wawancara di lakukan 25 agustus 2016)

Hal senada di sampaikan juga oleh ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong yang berinisial “H” menyatakan bahwa:

“ ya, Pemerintah memang mengeluarkan aturan pada saat selesai panen, dimana hasil pertanian para petani dikumpul dan di jual melihat hasil pertanian riap tahun menurun” (wawancara dilakukan 20 agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah mengeluarkan aturan pada pasca produksi yaitubagaimana mendistribusikan hasil-hasil pertanian para petani.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua kelompok tani pangajiang oleh bapak “M” menyatakan bahwa:

“Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan pada saat selesai panen dimana hasil pertanian para petani dikumpul dan dijual”(wawancara penulis 22 agustus 2016)

Hal senada juga disampaikan oleh ketua kelompok puka oleh bapak “N” menyatakan bahwa:

“Ya, pemerintah mengeluarkan aturan setelah panen, dimana hasil pertanian dikumpul dan dijual, akan tetapi banyak petani yang belum bisa menaati aturan tersebut karena keterikatan kepada pihak pedagang yang memberikan modal terlebih dahulu kepetani dan otomatis hasil pertanian d jual kepedagang tersebut walau harganya berbeda.

Hal senada juga di sampaikan oleh ketua kelompok tani Bulu bapak “A” menyatakan bahwa :

“Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen, yaitu hasil pertanian para petani dikumpul dan dijual” (wawancara penulis, 23 agustus 2016)

Pernyataan ketua kelompok tani saluttowa oleh bapak “K” juga menyatakan:

“ya, Pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen, yaitu hasil pertanian para petani dikumpul dan di jual” (wawancara penulis, 23 agustus 2016).

Berdasarkan wawancara Pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen, akan tetapi masih banyak petani yang menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak karena modal yang dipakai dipinjam dari tengkulak tersebut. Penulis dapat menyimpulkan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat selesai panen, masyarakat belum bisa menaati aturan tersebut di karenakan belum bisa menaati aturan tersebut di karenakan masyarakat sebagian besar masih banyak yang kekurangan modal sehingga para petani mengambil modal kepada tengkulak meskipun dengan harga yang jauh dibawah standar.

D. Faktor penghambat dan Pendukung Peningkatan Kinerja Kelompok Tani Di Kecamatan Tinggimoncong

a. Faktor penghambat

Peningkatan kinerja kelompok tani termasuk di bidang pertanian tidak terlepas dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan yang sering terjadi adalah sulitnya untuk mensinergiskan kinerja kelompok tani yang terjadi dilapangan yang diberikan oleh pemerintah kedalam suatu program yang terpadu. Akan tetapi tidak semua kegiatan tidak dapat

disinergiskan ada kinerja kinerja kelompok tani yang dapat disinergiskan dengan cepat dan mudah tergantung situasi dan kondisi di daerah tersebut.

Dalam program peningkatan kinerja kelompok tani banyak mengemukakan kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut dan ketidak berhasilan kelompok sasaran untuk mencapai tujuan akan tetapi masih banyak program-program yang berhasil dan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan program peningkatan kinerja kelompok dapat berasal dari kepribadian individu dalam kelompok, kurangnya kompetisi yang dimiliki aparat pemerintah, dan bisa juga berasal dari sistem sosial masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai mana telah dibahas diatas dapat diketahui beberapa faktor yang dianggap dapat menghambat keberhasilan pemerintah dalam hal dinas pertanian dalam meningkatkan kinerja kelompok tani. Faktor-faktor penghambat tersebut yang dapat didefinisikan menjadi dua aspek yakni faktor yang bersifat internal atau faktor yang bersumber dari dalam dan faktor eksternal atau faktor yang bersumber dari luar.

1. kurangnya tenaga penyuluh.

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis lakukan dengan sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gowa berinisial “i” menyatakan bahwa :

“Tenaga penyuluh yang disiapkan itu masih kurang, sehingga sangat menghambat pendampingan lapangan mengingat banyaknya kelompok tani yang ada di Kecamatan Tinggimoncong” (wawancara penulis 25 agustus 2016)

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong yang berinisial “H” menyatakan bahwa :

“tenaga penyuluh yang ada belum mampu memberikan bimbingan kepada anggota-anggota kelompok tani secara maksimal kerana tenaga penyuluh yang ada hanya 1 orang setiap kelurahan atau desa sedangkan kelompok tani yang bisa mencapai 30 kelompok tani yang tersebar setiap kelurahan atau desa” (wawancara penulis 22 agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari hadirnya tenaga penyuluh untuk mendampingi para petani dalam pembinaan dari penanaman hingga pasca panen. Namun pada kenyataannya penyuluh tidak selalu terlibat dalam memberikan pendampingan kepada kelompok tani di keranakan penyuluh yang ada satu orang saja setiap kelurahan atau desa.

Aspek yang bersifat eksternal dalam meningkatkan kinerja kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong adalah faktor yang bersumber dari luar meliputi :

2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan.

Hal tersebut dapat dilihat dari keengganan para anggota kelompok tani dalam mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang di lakukan oleh aparat penyuluh.

3. Adanya kebiasaan petani yang selalu memakai pupuk anorganik.

Petani kecamatan Tinggimoncong masih mengalami kesulitan dalam penanganan terhadap hama dan penyakit di akiabtkan karena kesuburan tanah yang menurun akibat penggunaan pupuk anorganik dan penggunaan pestisida yang berlebihan menjadi salah satu penghambat

dalam meningkatkan kinerja atau hasil kerja kelompok tani Kecamatan Tinggimncong. Hal ini di perkuat dengan pendapat Petugas Penyuluh Lapangan Oleh Bapak “H” menyatakan bahwa”

“sabagian anggota kelompok tani tidak mau menggunakan pupuk organik dipertanamannya sementara pendampingan yang diadakan itu bagian dari pemakaian pupuk organik dan apa yang diterapkan belum bisa dilaksanakan di sesuai program” (wawancara penulis 20 agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian petani tidak mau menggunakan pupuk organik diawal pertanamannya, padahal jika tanaman pemupukannya sebagian menggunakan pupuk organik itu dapat terus menjaga kesuburan tanah dan tidak terlalu bercampur dengan bahan kimia hingga hasil produksi dapat meningkat.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis lakukan dengan ketua kelompok tani pangajiang oleh bapak “M” menyatakan bahwa :

“hampir semua petani disini tidak mau menggunakan pupuk organik di pertanamannya dan apa yang di terapkan selama ini oleh pemerintah belum ada yang bisa menerapkan di luar program contoh teknik tanam jangung” (wawancara penulis, 22 agustus 2016)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa masih kurang pengetahuan petani dalam penggunaan pupuk, menjadi kendala bagi penyuluh dalam meningkatkn kinerja [atani di Kecamatan Tinggimoncong.

b. Faktor Pendukung

Faktor utama pendukung dalam peningkatan kinerja kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan kelompok tani.

Sebagaimana dari hasil wawancara penulis di lakukan dengan sekretaris Dinas Pertanian yang berinsial “i” menyatakan bahwa;

“adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah dengan Kelompok-kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong” (wawancara dilkukan 25 agustus 2016)

Hal senada juga di sampaikan oleh ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong:

“sering di adakan pertemuan antara PPL dan Kelompok Tani untuk membahas masalah serta kendala yang di hadapi oleh kelompok Tani sehingga terjalin kerja sama yang baik” (wawancara dilkukan 20 agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas salah satu proses peningkatan kinerja yang lebih baik adalah adanya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok tani. Kerjasama yang dimaksud adalah adanya hubungan antara pemerintah daerah dalam hal Dinas Pertanian Kabupaten Gowa. Kelompok Tani Kecamatan Tinggimoncong dan Dinas Pertanian mempunyai manfaat saling menguntungkan antara kedua pihak baik dari segi pelaksanaan kegiatan maupun dalam hal pemetikan hasil panen atau usaha tani. Proses peningkatan kinerja pada saat diadakannya kegiatan lapangan kerja sama semua sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keberhasilan usaha pertanian petani di Kecamatan Tinggimoncong sehingga masyarakat dapat mengembangkan usaha pertaniannya dengan nyaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab diatas, maka pada bagian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, peran pemerintah daerah yang meliputi dinamisor belum berjalan secara maksimal. Hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan bimbingan sebagai pendamping lapangan disebabkan karena tenaga penyuluh di Kecamatan Tinggimoncong masih sangat kurang. Faktor penghambat peningkatan kinerja kelompok tani yang diidentifikasi meliputi dua faktor yaitu faktor internal kurangnya tenaga penyuluh menjadi penghambat bagi berjalannya proses peningkatan kinerja kelompok tani, karena lewat tenaga penyuluh pemerintah memberikan pendidikan dan pendampingan bagi petani. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyuluhan dan adanya kebiasaan petani yang selalu memakai pupuk anorganik menjadi salah satu penghambat proses peningkatan hasil kerja. Faktor pendukung utama dalam peningkatan kinerja kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan kelompok tani

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat

memperbaiki ataupun menyempurnakan peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dalam meningkatkan kinerja kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa di masa yang akan datang. Saran-saran di maksud adalah:

1. Kelompok Tani harus memiliki pengurus dan anggota yang aktif.
2. Harus memiliki dana kelompok tani yang selalu berkembang, dana sangat penting bagi kelompok karena dana merupakan bahan bakar berjalannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu kelompok tani.
3. Memiliki usaha kelompok tani yang menguntungkan dan selalu berkembang, suatu kelompok tani akan meningkatkan permodalan kelompok.
4. Harus ada hubungan dengan pihak lain yang saling menguntungkan tentunya dari pihak pelaku usaha ingin membina dan mengembangkan usaha-usaha akan selalu ingin membina dan mengembangkan usaha-usaha yang telah dilakukan kelompok.
5. Pemerintah harus lebih giat memberi pelajaran kepada para petani agar mereka lebih mengerti bagaimana meningkatkan kualitas produksi mereka karena pada umumnya para petani banyak yang tidak memiliki pendidikan moral sehingga Peran Pemerintah Daerah sangat di perlukan.
6. Pemerintah harus lebih menambah tenaga penyuluh agar para anggota kelompok biasa lebih mendapatkan informasi-informasi terkait dengan usaha tani.

- Petani harus mengontrol dalam penggunaan pupuk anorganik dan juga pestisida sebab dampak penggunaan yang berlebihan akan memperparah kerusakan lingkungan.



Daftar Pustaka

- Amins, Achmad. 2012. *Manajemen Kinerja*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Fahmi, Irham 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampula: ALFABETA.
- Handoko, T. Hani. 2010. *Manjemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Husni jamal 2008. *Studi Pendahuluan Kinerja Kelompok*. Di akses tanggal 16 maret 2016
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT Refika Aditama. *Metode Pemberdayaannya*. Jurnal Litbang Pertanian. Bogor
- Mushero, Heroni. 2008. *Pemberdayaan Petani Melalui Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)*. <http://heronimushero.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 16 maret 2016.
- Nurmuharimah, Saniyanti, 2007. *Get Smart Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung :Grafindo Media Pratama.
- Nawami, Hadari 2006. *Evaluasi Dan Manejemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada Univercity press.
- Pasolong, Harbani, 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanian. Di terbitkan oleh Lembaga Dinas Pertanian kabupaten Gowa.
- Peraturan Menteri Pertanian No.273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Kelompok Tani.di terbitkan dalam majalah Analisis Kebijakan Pertanian Vol.10.No.2 tahun 2012.
- Purwanto, Sukur, M. Santoso 2007. *Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Di JawaTimur*. Bulletin Teknologi Dan Informasi Pertanian BPTP Jawa Timur.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju: Bandung.

- Siagian, Sondang 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia, bumi aksara*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Jakarta.
- Sugiyono 2012. *Memaham Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suhardiyono, L. 1992. *Penyuluhan Petunjuk Bagi Penyuluhan Pertanian*. Erlangga. Jakarta.
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 41/Kpts/OT. 210/1992 Tentang Kinerja Kelompok tani. Di terbitkan oleh Lembaga Distribusi Pangan.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Sutrisno, Edy. (2011). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syamsiah, 2013. *Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat Di Biro Administrasi Umum Dan Keuangan (BAUK) Universitas Negeri Makassar*. Makassar: Unismuh Makassar
- Tayibnapis, 2008. *evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan Dan Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Di terbitkan oleh lembaga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Di terbitkan oleh lembaga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Definisi Daerah. Di terbitkan oleh lembaga persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
- Wahyuni, Sri,. 2003. *Kinerja Kelompok Tani Dalam Sistem Usahatani Padi dan Metode Pemberdayaan*. Jurnal Litbang Pertanian. Bogor.
- Wawan juniadi 2013. *Peningkatan Kemampuan Kelompok tani Dalam Melaksanakan Fungsinya*. Di akses tanggal 16 maret 2016
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Dinas Pertanian

1. Apakah pernah bapak melaksanakan sosialisasi mengenai pelatihan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja kelompok tani?
2. Berapa kali bapak melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut ?
3. Apakah setiap ada kegiatan penyuluhan dan pendampingan bapak selalu ikut serta dalam memberikan pengarahan dalam kemajuan kinerja kelompok tani ?
4. Apa-apa saja yang telah di berikan oleh pemerintah daerah atau selaku Dinas pertanian kepada kelompok tani dalam peningkatan kinerjanya?
5. Apakah ada aturan yang di berlakukan kepada kelompok tani dalam kegiatan produksi dan hasil panen?
6. Apa apa saja faktor pendukung dan penghambat peningkatan kinerja kelompok tani ?

B. Penyuluh Pertanian Lapangan

1. Apakah bapak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia di kecamatan tinggimoncong ?
2. Berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan di kecamatan tinggimoncong.
3. Pengarahan apa saja yang di berikan kepada kelompok tani setiap melakukan penyuluhan?
4. Dalam bentuk apa saja yang di berikan pemerintah kepada kelompok tani dalam peningkatan kinerjanya ?

5. Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah dalam kegiatan produksi dan hasil panen ?
6. Apa-apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan kinerja kelompokb tani ?

C. Ketua Kelompok Tani

1. Apakah pernah di kecamatan tinggimoncong di laksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kinerja kelompok tani ?
2. Berapa kali kegiatan tersebut di laksanakan?
3. Pengarahan apa saja yang telah di berikan oleh ketua PPL dalam peningktan hasil kerja ?
4. Bantuan apa saja yang telah di berikan pemerintah daerah selaku dinas pertanian untuk kelompok tani?
5. Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam hal produksifitas dan hasil panen ?



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : I
Jabatan : sekretaris Dinas Pertanian
Waktu : 18 agustus 2016
Tempat : Dinas Pertanian Kabupaten Gowa

No	Pertanyaan	jawaban
1.	Apakah pernah bapak melaksanakan sosialisasi mengenai pelatihan sumber daya manusia dalam peningkatan kinerja kelompok tani?	Iya pernah
2.	Berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan di kecamatan tinggimoncong.	1 kali dalam 3 bulan setiap awal musim panen
3.	Apa-apa saja yang telah di berikan oleh pemerintah daerah atau selaku Dinas pertanian kepada kelompok tani dalam peningkatan kinerjanya?	Bantuan yang diberikan seperti benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk organik dan anorganik.
4.	Apakah setiap ada kegiatan penyuluhan dan pendampingan bapak selalu ikut serta dalam memberikan pengarahan dalam kemajuan kinerja kelompok tani ?	Iya pernah terlibat.
5.	Apakah ada aturan yang di berlakukan kepada kelompok tani dalam kegiatan produksi dan hasil panen?	Ada peraturan yang di buat Dinas Pertanian untuk kelompok tani untuk pengelolaan produksi dan hasil panen
6.	Apa apa saja faktor pendukung dan penghambat peningkatan kinerja kelompok tani ?	Kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah atau Dinas Pertanian dengan PPL dan Kelompok Tani dan penghambat

		kurangnya tenaga penyuluh, rendahnya partisipasi kelompok tani, kebiasaan memakai pupuk anorganik.
--	--	--

Nama : H
 Jabatan : PPL Kecamatan Tinggimoncong
 Tempat : lingkungan kecamatan Tinggimoncong
 Waktu : 20 agustus 2016

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah bapak pernah melaksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia di kecamatan tinggimoncong ?	Iya
2.	Berapa kali kegiatan tersebut dilaksanakan di kecamatan tinggimoncong.	Di lakukan setiap awal musim tanam
3.	Pengarahan apa saja yang di berikan kepada kelompok tani setiap melakukan penyuluhan?	Memberikan bimbingan mengenai paket teknologi baru kepada kelompok-kelompok tani.
4.	Dalam bentuk apa saja yang di berikan pemerintah kepada kelompok tani dalam peningkatan kinerjanya ?	Bantuan yang diberikan seperti benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk organik dan anorganik
5.	Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah dalam kegiatan produksi dan hasil panen ?	Ada peraturan yang di buat Dinas Pertanian untuk kelompok tani untuk pengelolaan produksi dan hasil panen

6.	Apa-apa saja faktor pendukung dan penghambat peningkatan kinerja kelompok tani?	Penghambat kurangnya petugas penyuluh tyang di sediakan, pendukung kerja sama yang baik oleh kelompok tani dan pemerintah daerah.
----	---	---

Nama : M

Jabatan : Ketua Kelompok Tani Pangajiang

Waktu : 22 agustus 2016

Tempat : Lingkungan Pangajiang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pernah di kecamatan tinggimoncong di laksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kinerja kelompok tani ?	Iya pernah
2.	Berapa kali kegiatan tersebut di laksanakan?	2 kali sebelum dan sesudah panen
3.	Pengarahan apa saja yang telah di berikan oleh ketua PPL dalam peningkatan hasil kerja ?	Memecahkan masalah yang di hadapi kelompok tani.
4.	Bantuan apa saja yang telah di berikan pemerintah daerah selaku dinas pertanian untuk kelompok tani?	Seperti bibit, pupuk
5.	Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam hal produksifitas dan hasil panen ?	Ada aturan yang di keluarkan pemerintah pada saat mengelola hasil panen.

Nama : N
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Pakua
 Waktu : 22 agustus 2016
 Tempat : Lingkungan Pakua

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pernah di kecamatan tinggimoncong di laksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kinerja kelompok tani ?	Iya ada
2.	Berapa kali kegiatan tersebut di laksanakan?	2 kali pada saat sebelum tanam dan pada saat panen
3.	Pengarahan apa saja yang telah di berikan oleh ketua PPL dalam peningkatan hasil kerja ?	Tentang bagaimana memilih pupuk dan memeberikan informasi bagaimana cara menangani hama.
4.	Bantuan apa saja yang telah di berikan pemerintah daerah selaku dinas pertanian untuk kelompok tani?	Seperti bibit unggul dan pupuk
5.	Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam hal produksifitas dan hasil panen ?	Ada aturan yang mengikat kepada petani yaitu hasil panennya di kumpul dan di jual ke tempat yang telah ditentukan

Nama : A
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Bulo
 Waktu : 23 agustus 2016
 Tempat : Lingkungan Je'ne Berang

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pernah di kecamatan tinggimoncong di laksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kinerja kelompok tani ?	Iya pernah
2.	Berapa kali kegiatan tersebut di laksanakan?	2 kali sebelum dan sesudah panen
3.	Pengarahan apa saja yang telah di berikan oleh ketua PPL dalam peningkatan hasil kerja ?	Memecahkan masalah yang di hadapi kelompok tani.
4.	Bantuan apa saja yang telah di berikan pemerintah daerah selaku dinas pertanian untuk kelompok tani?	Seperti bibit, pupuk
5.	Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam hal produksifitas dan hasil panen ?	Ada aturan yang di keluarkan pemerintah pada saat mengelola hasil panen.

Nama : K
 Jabatan : Ketua Kelompok Tani Saluttowa
 Waktu : 23 agustus 2016
 Tempat : Lingkungan Saluttowa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah pernah di kecamatan tinggimoncong di laksanakan kegiatan pelatihan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan kinerja kelompok tani ?	Iya ada
2.	Berapa kali kegiatan tersebut di laksanakan?	2 kali pada saat sebelum tanam dan pada saat panen
3.	Pengarahan apa saja yang telah di berikan oleh ketua PPL dalam peningkatan hasil kerja ?	Tentang bagaimana memilih pupuk dan memeberikan informasi bagaimana cara menangani hama.
4.	Bantuan apa saja yang telah di berikan pemerintah daerah selaku dinas pertanian untuk kelompok tani?	Seperti bibit unggul dan pupuk
5.	Apakah ada aturan yang di keluarkan pemerintah daerah dalam hal produksifitas dan hasil panen ?	Ada aturan yang mengikat kepada petani yaitu hasil panennya di kumpul dan di jual ke tempat yang telah ditentukan

MATRIKS WAWANCARA

A. Peran Dinas Pertanian dalam memberikan Pelatihan Sumber daya Manusia

Informan	Hasil Wawancara
Aparat Dinas Pertanian	dengan melakukan pertemuan dengan para kelompok tani selaku Kepala Dinas Pertanian sering memprogramkan kegiatan pelatihan-pelatihan di bidang pertanian seperti pelatihan sumber daya manusia yang biasa di lakukan setiap memasuki awal bulan tanam dan memberikan pengarahan untuk memakai pupuk organik pada awal pertanamannya
Ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong	di Kecamatan Tinggimoncong ini sering di lakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan terkait peningkatan sumber daya manusia pelatihan di lakukan setiap awal musim tanam di hadiri oleh Pemerintah Daerah atau Kepala dinas pertanian ketua PPL setempat dan perwakilan setiap kelompok tani dan pelatihan terakhir di lakukan di bulan april 2016
Ketua Kelompok Tani Pangajiang	Petani disini sangat terbantu dengan adanya pelatihan sumber daya manusia karena dengan adanya pelatihan ini di saat awal bulan tanam para ketua kelompok tani dapat berdiskusi langsung dan menyampaikan segala masalah yang di hadapi saat memulai bercocok tanam misalnya dalam penanganan hama pada tanaman
Ketua Kelompok tani Pakua	Kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan sumber daya manusia karena dapat membantu kami dalam pemecahan masalah, karena apabila ada tanaman yang terserang hama, penyuluh menyampaikan informasi kepetugas hama dan penyakit pada tanaman sekaligus memberikan nama racunnya
Ketua	Dengan adanya pertemuan yang diadakan pemerintah

Kelompok Tani bulo	terhadap petani disini itu sangat membantu menambah pengetahuan petani dalam hal penanganan masalah penyakit yang biasa timbul pada tanaman
Ketua kelompok Tani Saluttowa	dengan adanya pelatihan yang di berikan para petani sangat membantu di karenakan dapat membahas masalah masalah yang berhubungan dengan bibit pupuk yang cocok atau tidak cocok untuk tanaman

B. Penyuluh dan Pendampingan Lapangan

Informan	Hasil Wawancara
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	Iya saya selalu terlibat dalam kunjungan lapangan dan ikut mengevaluasi sejauh mana perkembangan kegiatan yang di lakukan.
Ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong	Dengan melakukan pendampingan lapangan, memberikan bimbingan mengenai paket teknologi baru kepada kelompok-kelompok tani yang melakukan sekolah lapang dan melakukan pembinaan kegiatan tentang bagaimana pengolahan tanah yang baik, teknik penghamburan, jarak tanam serta pemupukan berimbang dan dilakukan pengamatan bagaimana mengenali suatu penyakit atau hama
Ketua Kelompok Tani Pangajiang	Iya sudah, tapi di Kecamatan Tinggimoncong ini masih kekurangan tenaga penyuluh dari pertanian mengingat tingkat kebutuhan kelompok tani sangat tinggi karena banyaknya kelompok tani yang ada
Ketua Kelompok tani Pakua	Ya, pemerintah memang sudah melakukan kegiatan pendampingan lapangan, akan tetapi penyuluh yang ada masih kurang dan belum mampu membawahi kelompok tani yang ada di Kecamatan Tinggimoncong mengingat

	banyaknya kelompok tani disini
Ketua Kelompok Tani bulo	Ya sudah, pelaksanaan dilapangan hingga saat ini, telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah mendapat respon yang baik dari petani, namun kendala besar yang dialami oleh petani bahwa kurangnya tenaga pembimbing dilapangan sehingga menyulitkan bagi petani untuk mendapatkan informan
Ketua kelompok Tani Saluttowa	Ya, akan tetapi kegiatan pendampingan yang dilakukan belum secara maksimal karena tenaga penyuluh yang disediakan tidak mencukupi mengingat kelompok tani disini cukup banyak

C. Pengadaan Modal Dan Alat Sarana dan Prasarana Untuk Kelompok Tani

Informan	Hasil Wawancara
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	Pemerintah telah memberikan bantuan berupa benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk seperti pupuk anorganik, pupuk organik dan obat-obatan bagi setiap kelompok tani yang melakukan kegiatan
Ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong	“Pemerintah telah memberikan bantuan berupa benih yang bermutu/varietas unggul, pupuk seperti pupuk anorganik, pupuk organik dan obat-obatan bagi setiap kelompok tani yang melakukan kegiatan
Ketua Kelompok Tani Pangajiang	Dalam kegiatan yang dilaksanakan pemerintah menyediakan benih, pupuk dan obat-obatan yang dipakai pada lahan yang merupakan milik setiap kelompok tani
Ketua Kelompok tani Pakua	Pemerintah memberikan bantuan mulai dari benih kemudian pupuk seperti pupuk anorganik dan pupuk organik serta obat-obatan yang dipakai dalam kegiatan sekolah lapang yang dilaksanakan

Ketua Kelompok Tani bulo	Pemerintah menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan seperti benih, pupuk dan obat-obatan pembasmi hama dan penyakit yang dipakai dalam kegiatan peningkatan hasil panen para kelompok tani”
Ketua kelompok Tani Saluttowa	Dalam kegiatan yang diadakan pemerintah itu memfasilitasi kebutuhan seperti benih unggul yang akan ditanam, kemudian pemerintah memberikan pupuk baik itu pupuk anorganik maupun pupuk organik serta obat-obatan yang dapat membasmi hama dan penyakit pada tanaman

D. Produksi dan hasil panen

Informan	Hasil Wawancara
Sekretaris Dinas Pertanian kabupaten Gowa	Pemerintah memang banyak mengeluarkan aturan-aturan terutama pada saat selesai panen yaitu dimana hasil pertanian petani dikumpulkan kemudian dijual di karenakan produksi sayur-sayuran dari tahun-ketahun menurun di bandingkan dengan komoditi padi, palawija, dan buah-buahan.
Ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong	Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan pada saat selesai panen dimana hasil pertanian para petani dikumpul dan dijual
Ketua Kelompok Tani Pangajiang	Ya, pemerintah mengeluarkan aturan setelah panen, dimana hasil pertanian dikumpul dan dijual, akan tetapi banyak petani yang belum bisa menaati aturan tersebut karena keterikan kepada pihak pedagang yang memberikan modal terlebih dahulu kepetani dan otomatis hasil pertanian di jual kepedagang tersebut walau harganya berbeda.
Ketua Kelompok tani Pakua	Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen, yaitu hasil pertanian para petani dikumpul dan dijual
Ketua	Pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah

Kelompok Tani bulo	panen, akan tetapi masih banyak petani yang menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak karena modal yang dipakai dipinjam dari tengkulak tersebut
Ketua kelompok Tani Saluttowa	Ya, pemerintah memang mengeluarkan aturan setelah panen, yaitu hasil pertanian para petani dikumpul dan dijual

E. Faktor pendukung dan penghambat

1. Faktor Penghambat

Informan	Hasil Wawancara
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	Tenaga penyuluh yang disiapkan itu masih kurang, sehingga sangat menghambat pendampingan lapangan mengingat banyaknya kelompok tani yang ada di Kecamatan Tinggimoncong
Ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong	tenaga penyuluh yang ada belum mampu memberikan bimbingan kepada anggota-anggota kelompok tani secara maksimal kerana tenaga penyuluh yang ada hanya 1 orang setiap kelurahan atau desa sedangkan kelompok tani yang bisa mencapai 30 kelompok tani yang tersebar setiap kelurahan atau desa

2. Faktor pendukung

Informan	Hasil wawancara
Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gowa	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan kelompok-kelompok tani di Kecamatan Tinggimoncong
Ketua PPL Kecamatan Tinggimoncong	Sering di adakan pertemuan antara PPL dan kelompok tani untuk membahas masalah serta kendala yang di hadapi oleh kelompok tani sehingga terjalin kerja sama yang baik

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, Agustini lahir di Ujung Pandang Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Agustus 1994 merupakan anak keempat dari 5 (lima) bersaudara dari pasangan Bapak H.Muh.Said dan Ibu Hj.Maimuna, penulis berkembang di Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, penulis menempuh pendidikan di SDN JONJO II Kecamatan Tinggimoncong pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian terdaftar sebagai siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Malino pada tahun 2006 dan tamat tahun 2009. Kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Malino pada Tahun 2009 dan tamat 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studi di tahun 2017 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Kelompok Tani Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa”.